

Keputusan Abstain Afrika Selatan Pada Resolusi *Protection Against Violence And Discrimination Based On Sexual Orientation And Gender Identity* 2016

Oleh: Siti Khoiriyah / 0711102013

ABSTRAK

Afrika Selatan merupakan negara pertama yang memasukkan istilah orientasi seksual dalam konstitusi negara pada tahun 1996 setelah terlepas dari politik pemerintahan apartheid. Hal ini kemudian membawa Afrika Selatan menginisiasi resolusi yang berjudul "*Resolution on Sexual Orientation and Gender Identity*" pada tahun 2011, yang merupakan usaha pertama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam merujuk kasus diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender melalui pengaduan laporan kekerasan. Sebagai negara dengan sebutan *Rainbow Nation* dan inisiator pada resolusi tersebut, Afrika Selatan diharapkan akan selalu turut mendukung berbagai upaya PBB dalam memberantas diskriminasi tersebut. Akan tetapi pada tahun 2016, Afrika Selatan melakukan *abstain*, yang merupakan tindakan tidak setuju namun juga tidak menolak, terhadap "*Resolution Protection Against Violence and Discrimination Based on Sexual Orientation and Gender Identity*" yang mengusulkan pembentukan *Independent Expert* dalam rangka peningkatan perlindungan hak kelompok LGBT. Sikap ini dinilai problematis dan merupakan sebuah kemunduran karena dengan rekam jejak sejarah dukungan terhadap hak asasi manusia, Afrika Selatan dengan dasar normanya semestinya maju untuk menyetujui keputusan tersebut. Penelitian ini akan membahas faktor keputusan Afrika Selatan yang memilih untuk abstain dari segi norma dan perilaku *voting*. Banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk memahami perilaku *voting* Afrika Selatan pada isu hak asasi manusia selama menjadi Dewan Hak Asasi Manusia di PBB sebelumnya. Tulisan ini akan menitikberatkan bagaimana norma yang diadopsi oleh Afrika Selatan mempengaruhi bagaimana Afrika Selatan memutuskan suatu perkara dan bagaimana lingkungan juga dapat mempengaruhi keputusan negosiator pada *voting*.

Kata Kunci: Afrika Selatan, LGBT, Hak Asasi Manusia, Negosiasi Internasional

Terminologi dari SOGI atau *Sexual Orientation and Gender Identity* merupakan sebuah konsep luas yang menciptakan ruang untuk identifikasi diri dan telah dijelaskan sebelumnya pada *Yogyakarta Principle*.¹ Pada pedoman *United Nations of Human Right Council* (UNHRC), orientasi seksual merujuk pada kemampuan tiap orang untuk mengalami ketertarikan emosional, afeksi, dan seksual atau hubungan intim kepada individu dengan gender yang berbeda, sama, atau memiliki lebih satu gender. Sedangkan identitas gender itu sendiri merujuk pada apa yang tiap orang rasakan terkait pengalaman internal dan individual tentang gender, termasuk pemahaman personal mengenai badan dan ekspresi lain gender termasuk diantaranya adalah pakaian, cara berbicara dan berperilaku. Gender tidak harus selalu berhubungan dengan jenis kelamin ketika seseorang lahir. Pemahaman terhadap hak-hak kelompok LGBT juga menggunakan perspektif hak asasi manusia seperti apa yang dikatakan Helfer dan Miller², “*the freedom to establish intimate relationship, to enjoy sexual practices, and to develop a sexual identity takes on the equality of other fundamental and universally recognized rights... Every human being has a sexual orientation and every individual should have the ability to develop and manifest the sexual activities and identity that reflect that orientation in harmony with his or her own desires and receive the respect and protection of the state.*”

Afrika Selatan merupakan negara kelima di dunia dan menjadi satu-satunya negara di Afrika yang melakukan pelegalan pernikahan sesama jenis. Sebagian besar negara di Afrika adalah negara yang intoleran terhadap kelompok minoritas homoseksual karena menganggap perilaku homoseksual bukanlah perilaku masyarakat Afrika.³ Meski *African Charter* pada pasal 2 menuliskan penghapusan tindakan diskriminasi berdasar ras, gender, dan status lain, sebagian besar negara di Afrika masih mempunyai hukum terkait perilaku homoseksual sebagai tindakan kriminal seperti di Uganda, Malawi, dan sebagainya, serta hukum sodomi seperti di negara Ghana dan Kenya.⁴

Pengakuan hak melalui hukum bagi kelompok minoritas orientasi seksual dan identitas gender (*sexual orientation and gender identity* / SOGI) atau biasa dikenal dengan kelompok LGBT (Lesbian Gay Biseksual Transeksual) di Afrika Selatan dimulai dengan berakhirnya politik *apartheid* Afrika Selatan pada tahun 1990 dan dibentuknya konstitusi baru sebagai konsekuensi perubahan politik. Pada tahun 1993, Afrika Selatan menggunakan konstitusi sementara, yang pada pasal 8 *Equality*, telah menyebutkan orientasi seksual sebagai salah satu hal yang tidak layak untuk menjadi dasar tindakan diskriminasi. Setelah pemilihan umum pada tahun 1994, konstitusi sementara diganti dengan konstitusi 1996, yang melalui bab *Bill of Rights*, Afrika Selatan telah mengakui hak dan perlindungan kepada kelompok minoritas orientasi seksual. Hal tersebut sekaligus menjadikan

1 United Nations High Commissionair of Refugee, "GUIDELINES ON INTERNATIONAL PROTECTION NO. 9;" October 23, 2012, , accessed September 26, 2017, <https://www.unhcr.org/509136ca9.pdf>.

2

3 Lihat pernyataan Zackie Achmat, aktivis AIDS dan hak asasi manusia Afrika Selatan “*Many African politicians.....want to blame the West for everything, homosexuality included*”, Human Rights Watch, Together, Apart 1– Organizing around Sexual Orientation and Gender Identity Worldwide (New York: Human Rights Watch., 2009) hal. 10

4 Global Legal Research Center Directorate, Laws on Homosexuality in African Nation, working paper, The Law Library of Congress (<https://www.loc.gov/law/help/criminal-laws-on-homosexuality/homosexuality-laws-in-african-nations.pdf>, 2014).

Afrika Selatan sebagai negara pertama di dunia yang menyebutkan orientasi seksual dalam konstitusi dan mendapat sebutan *Rainbow Nation*.⁵

Perkembangan pengakuan hak kelompok SOGI (selanjutnya penulis sebut LGBT) dicapai dengan dihapuskannya hukum-hukum yang mengatur pelarangan perilaku homoseksual pada tahun 1998 dengan dihapusnya pasal 20A terkait homoseksual pada *Sexual Offence Act No. 23* tahun 1957, sodomi yang masuk dalam *Schedule 1 Criminal Procedure Act 1977* dan *Schedule Security Officers Act*.⁶ Di tahun 2006, Afrika Selatan mengesahkan undang-undang *Civil Union* yang melegalkan pasangan di umur 18 tahun ke atas, tanpa menyebut pernikahan sebagai pesatuan antara laki-laki dan perempuan.

Sebelumnya Peran Afrika Selatan pada pengakuan hak kelompok LGBT di level internasional diawali pada keterlibatannya dalam Women's Conference di Beijing pada tahun 1995. Organisasi non-pemerintah *International Gay and Lesbian Human Rights Commission* (IGLHRC) menekankan bahwa diskriminasi terhadap wanita juga bisa terjadi karena orientasi seksualnya.⁷ Afrika Selatan menyatakan bahwa ia sangat menentang diskriminasi berdasarkan orientasi seksual. Meskipun demikian, istilah orientasi seksual tersebut tidak masuk dalam Deklarasi Beijing karena mengundang perdebatan besar dan ditolak oleh beberapa negara Islam dan Katolik. Beberapa negara di kontinen Afrika juga menolak penyebutan orientasi seksual.⁸ Sedangkan pada tahun 2003, Afrika Selatan memilih untuk abstain pada resolusi Brazil mengenai hubungan hak asasi manusia dan orientasi seksual yang diajukan kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC). Terdapat upaya untuk menghalangi diskusi terkait resolusi tersebut melalui tiga kali *votes*. Afrika Selatan memberikan suara *abstain* sebanyak dua kali dan satu kali berpihak pada oposisi resolusi Brazil.⁹ Pada tahun 2008, Afrika Selatan tidak turut ikut ambil bagian dari 66 negara yang menandatangani pernyataan bersama (*joint agreement*) mengenai hak asasi manusia, orientasi seksual dan identitas gender yang disampaikan oleh Argentina.¹⁰ Meski tidak turut ikut dalam menandatangani pernyataan bersama tersebut, Afrika Selatan menyatakan bahwa ia mendukung adanya pernyataan tersebut. Sementara pada tahun 2009, Afrika Selatan pada *Durban Review Conference* memilih untuk tidak mendukung hal tersebut dengan menyatakan bahwa isu perlindungan hak kelompok LGBT berada di luar kerangka kerja Deklarasi Durban.

Namun setelah pergantian presiden Afrika Selatan di tahun 2009, Afrika Selatan pada akhirnya mensponsori resolusi "*Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity*" pada tahun 2011. Tidak sendiri, Afrika Selatan menggandeng organisasi non pemerintah (*non-government organization* atau

5 negara yang dikenal karena konstitusi progresifnya dan negara pertama di dunia yang secara khusus melarang diskriminasi berdasarkan orientasi seksual.

6 Case CCT 11/98, [Http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/1998/15.pdf](http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/1998/15.pdf) (CONSTITUTIONAL COURT OF SOUTH AFRICA 1998).

7 Palesa Beverley Ditsie, "Lesbian Statement at WCW Plenary" (speech, International Gay and Lesbian Human Rights Commission United Nations Fourth World Conference on Women, China, Beijing, September 13, 1995).

8

9 Jordaan Eduard, "South Africa and Sexual Orientation Rights at the United Nations: Batting for Both Sides," *Politikon*, 2017, accessed August 21, 2017, http://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=3336&context=soss_research

10 Human Rights Watch, "UN: General Assembly Statement Affirms Right For All," *Human Rights Watch*, June 18, 2008, accessed August 23, 2017, <https://www.hrw.org/news/2008/12/18/un-general-assembly-statement-affirms-rights-all>.

NGO) seperti ARC International dan ILGA, serta negara lain. Resolusi ini memuat permintaan penghapusan kekerasan, perlindungan, serta pembuatan laporan mengenai kekerasan yang dialami kelompok minoritas homoseksual dan identitas gender. Implementasi dari resolusi ini adalah keluarnya laporan kekerasan terhadap kelompok minoritas LGBT pada Desember 2011 dengan judul *"Discriminatory Laws and Practices and Acts of Violence Against Individual"*. Amandemen terhadap resolusi ini dilakukan pada tahun 2014, namun kali ini Afrika Selatan tidak ikut mensponsori, namun melakukan *voting in favor*.¹¹ Resolusi ini diajukan oleh Brazil, Chile, Kolombia, dan Uruguay. Keempat negara tersebut mengajukan permohonan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membuat laporan dan sekaligus merumuskan solusi untuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas LGBT yang dilakukan oleh suatu negara.

Pada bulan Mei tahun 2016, Afrika Selatan menjadi tuan rumah konferensi yang diselenggarakan oleh *Pan African International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association*, tepatnya di Kota Johannesburg, Afrika Selatan. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri dari Kementerian Keadilan dan Pembangunan Konstitusi (*Ministry of Justice and Constitutional Development*) Afrika Selatan, John Jeffrey. Jeffrey menyatakan *"every step in preventing SOGI discrimination and prejudice is ground-breaking. The world is changing and we are moving forward"*.¹²

Resolusi *"Protection Against Violence and Discrimination Based on Sexual Orientation and Gender Identity"* disetujui oleh *United Nation Human Right Council* (UNHRC) pada bulan Juni tahun 2016. Resolusi ini mengusulkan pembentukan suatu badan independen yang beranggotakan para ahli untuk mengawasi tindak kekerasan terhadap kelompok minoritas LGBT. Hasil *voting* pada resolusi ini adalah 23 negara setuju, 19 negara menolak, dan 6 negara memilih untuk *abstain*.¹³ Afrika Selatan pada saat itu merupakan anggota dari UNHRC dan berhak memberikan *voting* atas resolusi tersebut. Melalui perwakilannya di PBB, Nozipho Mxakato-Diseko, Afrika Selatan menyatakan ketidaksepakatan negaranya untuk mendukung resolusi tersebut dan memilih untuk *abstain*. Meskipun suatu negara telah membawa kebijakan luar negeri bersamanya, akan tetapi, aktor negara bisa melakukan perubahan kebijakan.

Seperti yang dikatakan oleh Downie bahwasannya preferensi aktor itu cair, tidak tetap, dan mengalami fluktuasi seiring panjang prosesnya negosiasi. Untuk itu, setelah sekian sepak terjang Afrika Selatan baik pada lingkup domestik dan internasional, mengapa Afrika Selatan memilih untuk abstain?

Norma Sebagai Landasan Kebijakan Luar Negeri

11 ARC International, "South Africa: Abstention as Regression," ARC-International, 2016, , accessed October 9, 2016, <http://arc-international.net/global-advocacy/human-rights-council/32nd-session-of-the-human-rights-council/appointing-an-independent-expert-on-sexual-orientation-and-gender-identity-an-analysis-of-process-results-and-implications/iv-understanding-the-political-why-did-states-vote-the-way-they-did/south-africa-abstention-as-regression/>.

12 Melanie Judge, "SA's Abstinence on UN Sexual and Gender Rights Vote Is Reckless," Mail & Guardian, July 6, 2016, , accessed October 9, 2016, <https://mg.co.za/article/2016-07-06-00-sa-reckless-on-un-gender-and-sexual-rights-vote>

13 Human Rights Watch, "UN Makes History on Sexual Orientation, Gender Identity," Human Rights Watch, June 30, 2016, , accessed October 8, 2016, <https://www.hrw.org/news/2016/06/30/un-makes-history-sexual-orientation-gender-identity>.

Menurut Raymond Cohen, definisi negosiasi adalah interaksi dimana beberapa pihak mempunyai pandangan berbeda terhadap suatu hal, ketidaksepakatan akan sesuatu pada awalnya, dan melalui permintaan oleh pihak-pihak yang terkait, atau diskusi untuk mengeksplorasi pandangan masing-masing, dan mencoba untuk mencapai sebuah kesepakatan. Tujuan negosiasi adalah untuk menyetujui transaksi atau persetujuan baru. Negosiasi internasional merupakan proses yang rumit karena melalui proses ini, negara harus berhadapan dengan berbagai tekanan. Olekalns dan Adair (2013) menyatakan bahwa negosiasi melibatkan negosiator individual, dinamika sosial-psikologis di antara para negosiator, dan faktor luas kontekstual seperti peran sosial, norma, nilai, stereotipikal, kerumitan teknis, situasi politik, konstituen *stakeholder*, audiens, dan epistemologi.¹⁴ Dari banyaknya faktor tersebut Robert D. Putnam melalui *two level games* menjelaskan teori yang terjadi pada lingkup negosiasi internasional. Pada tingkat nasional, kelompok domestik mengejar kepentingan mereka dengan menekan pemerintah untuk mengadopsi peraturan-peraturan yang menguntungkan mereka. Politisi menggalang kekuatan dengan membuat koalisi dengan kelompok tersebut. Sementara pada tingkat kedua, yaitu ranah internasional, pemerintah suatu negara berusaha untuk memaksimalkan kemampuan mereka dalam menanggapi tekanan dari luar negeri, dan selain itu juga berusaha untuk meminimalkan konsekuensi yang merugikan. Tiap negara tidak dapat mengabaikan salah satu dari kedua tingkat permainan ini, selama mereka masih berupa negara yang berdaulat namun bergantung pada satu sama lain.¹⁵ Sebelum suatu negara berakhir dengan memutuskan suatu keputusan, dalam hal ini melakukan *voting up* dan *down* atau abstain, maka suatu negara akan membentuk preferensi kebijakannya. Preferensi dan koalisi ini merujuk pada kekuatan dan preferensi kebanyakan aktor yang diantaranya adalah tinggi rendahnya biaya, kepentingan domestik, dan institusi yakni mengenai prosedur ratifikasi. Terakhir strategi negosiator yakni terkait keuntungan transaksi serta dalam memaksimalkan *win-set*, namun menurunkan posisi tawar.¹⁶ *Win-set* adalah ini merujuk seperangkat kemungkinan yang bisa dimenangkan ketika bernegosiasi dengan negara lain. Menurut Mnookin and Kornhauser (1979), etika proses legal adalah alternatif bagi perjanjian, negosiator menawar dengan alasan hukum, sehingga mampu mempengaruhi apa yang ingin mereka terima dari suatu negosiasi.

Griffith et. al. (2008) menyatakan bahwa tanpa adanya norma yang konstruktif, maka tindakan negara tidak jelas dan tidak akan bisa dijelaskan. Pendekatan melalui norma ini dinilai penting karena negara dalam mengambil tindakan tidak hanya karena perihal materi, melainkan terdapat faktor lain seperti perimbangan kekuatan (*balance of power*), norma dan praktik internasional sebagai kunci untuk menjelaskan kebijakan luar negeri. Norma diidentifikasi sebagai ekspektasi kolektif tentang suatu perilaku yang pantas terhadap suatu identitas yang diberikan.¹⁷ Dalam Boekle, Rittberger, dan Wagner, norma berbeda dengan variabel lain dengan adanya tiga hal yakni intersubjektivitas, orientasi langsung

14 John Lande, "Taming the Jungle of Negotiation Theories," University of Missouri School of Law Legal Studies Research Paper No. 2017-29, 2017, accessed May 19, 2018, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3089855 hal. 90

15 Robert D. Putnam, "Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games," *International Organization*, 42, 3, 1988.

16 *ibid*

17 Jepperson dalam Martha Finnemore dan Kathryn A. Sikkink "International Norm Dynamics and Political Change." *International Organization*, 2005

ke perilaku dan referensi nilai dan validitas kontrafaktual. Intersubjektivitas mengarah pada pengertian bahwa norma itu berbeda dengan keyakinan yang dipegang oleh individu. Orientasi pada perilaku mengartikan norma berbeda dari ide, nilai, dan kepercayaan kausal sebab akibat, namun lebih ke bentuk konkret dan ekspektasi secara eksplisit tentang benar tidaknya suatu tindakan negara. Karakteristik ketiga yakni bahwa norma selalu melibatkan nilai sehingga dari situ muncul validitas kontrafaktual yang menjadikan eksistensi norma tidak dipertanyakan atau dilanggar.¹⁸ Norma dalam kasus ini adalah hukum dasar di Afrika Selatan, yakni pada Konstitusi Afrika Selatan tahun 1996. Dukungan terhadap hak asasi manusia pada LGBT sudah tertulis jelas pada *Bill of Rights*, bahwa terdapat larangan bagi kekerasan dan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual. Selain itu hukum anti diskriminasi lain melalui Undang-undang Kekerasan Domestik tahun 1999 yang mencakup pasangan homoseksual, Undang-undang *Alteration of Sex Description and Sex Act* tahun 2003 hak untuk melakukan operasi kelamin di bawah, Undang-undang pernikahan di bawa *Civil Union Act* 2006, dan hukum lainnya termasuk hukum yang menghapus kriminalisasi homoseksualitas, dan memperbolehkan pasangan homoseksual untuk mendapatkan hak adopsi. Undang-undang tersebut menjadi dasar dan dinyatakan langsung oleh delegasi Afrika Selatan di Dewan Hak Asasi Manusia, Nozipho Mxakato Diseko, "*For South Africa, respect for the promotion, protection and fulfillment of human rights and fundamental freedoms as enshrined in our Constitution constitutes the critical pillar of our foreign policy.*" Beliau menyatakan bahwa Afrika Selatan menghargai promosi, proteksi dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dan hal tersebut sudah dinyatakan dalam konstitusi negara Afrika Selatan. Penggunaan norma atau hukum disini menjadi dasar sebagai Afrika Selatan untuk tetap mendukung gerakan perlindungan hak LGBT.

Ketika di suatu negosiasi internasional, dalam proses ratifikasi suatu persetujuan, level I merupakan proses tawar menawar antar aktor. Lalu level II adalah diskusi terpisah dalam tiap grup konstituen untuk memutuskan apakah suatu negara perlu meratifikasi kebijakan tersebut. Level II yang dimaksud disini termasuk agen birokrasi, grup kepentingan, kelas sosial, atau bahkan opini publik. Level I dan level II saling berhubungan ketika suatu persetujuan pada level II mengalami penolakan maka hal tersebut akan mempengaruhi level II. Kendala yang ditemui dalam proses ratifikasi adalah perjanjian harus diratifikasi oleh kedua pihak. Perjanjian pada level I tidak bisa diamandemen di level II tanpa membuka negosiasi di level I yang akhirnya suatu ratifikasi, melalui *voting*, harus dipilih *up* atau *down*. Modifikasi pada perjanjian tingkat I akan dianggap penolakan kecuali disepakati oleh semua pihak dalam perjanjian.¹⁹ Seperti ketika negara Saudi Arabia menentang adanya resolusi hak LGBT dan meminta amandemen di pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Menurut Finnemore dan Sikkink (2005), Norma domestik sangat berhubungan dengan kerja norma internasional. Hal ini dikarenakan norma internasional juga sebelumnya adalah norma domestik. Sedangkan norma internasional harus bisa mempengaruhi negara melalui filter struktur domestik dan norma domestik.

18 Henning Boekle, Volker Rittberger, and Wolfgang Wagner, "Norms and Foreign Policy: Constructivist Foreign Policy Theory," 1999, , accessed August 1, 2019, https://www.academia.edu/17648915/Norms_and_Foreign_Policy_Constructivist_Foreign_Policy_Analysis

19 Robert D. Putnam, "Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games," *International Organization*, 42, 3, 1988.

Dalam hal ini terjadi pertentangan antara norma satu dan norma lainnya. Afrika Selatan dari dalam negeri telah memiliki norma yang sama dengan apa yang diharapkan oleh resolusi “*sexual orientation and gender identity*” dan juga oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Namun di sisi lain, Afrika Selatan mengadopsi norma lain yakni norma yang dihasilkan dalam lingkup regionalnya, yakni Uni Afrika. Melalui norma non-intervensi yang disetujui bersama, negara Afrika menempatkan kedaulatan negara dan menghargai batasan antar negara di atas hubungan regional tersebut. Norma non-intervensi ini ditumpahkan dalam *Constitutive Act of the AU*, yakni peraturan perundangan bagi negara-negara di kontinen Afrika yang menolak kegiatan subversif di antara negara anggota AU. Kegiatan subversif ini maksudnya adalah tindakan apapun yang menghasut, memperburuk, atau menciptakan pertikaian di dalam atau di antara negara-negara anggota AU dengan maksud atau tujuan untuk membuat kestabilan atau menggulingkan rezim yang ada atau tatanan politik, di antaranya yaitu dengan menimbulkan perbedaan ras, agama, bahasa, etnis dan lainnya yang melanggar Konstitusi dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.²⁰ Intervensi tanpa menggunakan senjata juga tetap dihitung sebagai suatu intervensi. Sedangkan untuk intervensi sendiri seharusnya dilakukan pada kondisi genting dan mengancam kestabilan negara lain serta mengganggu prinsip perdamaian dan keamanan. Kondisi genting dan mengancam kestabilan negara lain yang dimaksud tersebut mencakup kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dari sini terlihat bahwasannya urusan mengintervensi dalam artian memasuki wilayah kekuasaan negara lain, yang bukan hanya mengenai wilayah namun juga terkait politik dalam negerinya, maka hal tersebut sudah termasuk melanggar prinsip non-intervensi. Sedangkan norma hak asasi manusia yang dikembangkan oleh Uni Afrika sendiri tidak mencakup isu hak LGBT. Hal ini dikarenakan dari lingkup domestik sendiri, LGBT tidak diakui, bahkan dijadikan sebagai alat politik untuk mendapatkan konstituen homofobik dan memenangkan pemilihan umum seperti di Nigeria. Contoh lain Afrika Selatan melakukan usaha non-intervensi adalah ketika Uganda menyatakan kriminalisasi pada para gay pada awal tahun 2014, Afrika Selatan memilih untuk tidak mengomentari apa yang dilakukan Uganda. Afrika Selatan menyatakan bahwa negaranya juga memiliki tantangan dalam perlindungan hak kelompok LGBT. Bertentangan dengan sikap tersebut, Afrika Selatan menyatakan bahwa negaranya masih berpendirian teguh dalam menghormati promosi, perlindungan dan pemenuhan kebebasan hak asasi manusia.

Dalam norma hak asasi manusia yang dipegang oleh AU, melalui Piagam AU belum menuliskan tentang hak bagi kelompok minoritas. Namun pada tahun 1994 kepala negara-negara Afrika berkumpul dan merumuskan bahwa hak yang dimaksud adalah perlindungan identitas etnis, budaya, bahasa dan agama dari semua rakyat kita, termasuk minoritas nasional, dan penciptaan kondisi yang kondusif untuk promosi bagi kelompok dengan identitas ini.²¹ Akan tetapi hingga saat ini, isi piagam masih tidak terjadi perubahan dimana isi piagam sama sekali tidak menyinggung tentang orientasi seksual. Pada tahun 2014, benua Afrika melalui The African Commission on Human and Peoples' Rights yang

20 Bience Gawanas, "The African Union: Concepts and Implementation Mechanisms Relating to Human Rights.," Human Rights in Africa, Legal Perspectives on Their Protection and Promotion, 2009, , accessed July 11, 2019, Human Rights in Africa Legal Perspectives on their Protection and Promotion.

21 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, MINORITY RIGHTS UNDER THE AFRICAN CHARTER ON HUMAN AND PEOPLES' RIGHTS.

didirikan oleh African Union, membuat sebuah kemajuan dengan membuat resolusi 275 “*Resolution on the Protection against Violence and other Human Rights Violations against Persons on the Basis of their Real or Imputed Sexual Orientation or Gender Identity*” untuk melindungi hak kelompok LGBT di Afrika. Meski begitu, sifat resolusi ini tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi bisa digunakan dalam agenda untuk melindungi hak LGBT di Afrika.

Tugas *independent expert* ini sesuai apa yang resolusi *protection against violence based on sexual orientation and gender identity* ini antara lain 1) untuk menilai implementasi instrumen HAM internasional yang ada sehubungan dengan cara-cara untuk mengatasi kekerasan dan diskriminasi terhadap orang-orang berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender mereka, sambil mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan kesenjangan; 2) meningkatkan kesadaran akan kekerasan dan diskriminasi terhadap orang-orang berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender mereka; 3) terlibat dalam dialog dan untuk berkonsultasi dengan Negara dan pemangku kepentingan terkait lainnya, termasuk badan-badan PBB, program dan dana, mekanisme HAM regional, lembaga HAM nasional, organisasi masyarakat sipil dan institusi akademik; 4) bekerja dalam kerja sama dengan Negara-negara dalam rangka mendorong pelaksanaan langkah-langkah yang berkontribusi pada perlindungan semua orang terhadap kekerasan dan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender; 5) menangani berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dihadapi oleh orang-orang berdasarkan berbagai orientasi seksual dan identitas gender mereka; 6) melakukan, memfasilitasi dan mendukung penyediaan layanan konsultasi, bantuan teknis, pengembangan kapasitas dan kerjasama internasional dalam mendukung upaya nasional untuk memerangi kekerasan dan diskriminasi terhadap orang-orang berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender mereka. Dari apa yang penulis temui dalam resolusi di atas, isi dari resolusi tersebut telah bertentangan dengan apa yang sudah disetujui oleh Uni Afrika sebagai tindakan kegiatan intervensi. Apabila penulis kaitkan, hal tersebut berhubungan dengan kewenangan negara dalam mengatur negara dan meregulasi negaranya sendiri tanpa adanya keterlibatan negara lain yang ikut campur dalam urusan domestik. Edna Molewa, yang merupakan ketua *African National Congress (ANC)*, menyatakan pendapatnya bahwa “*South Africa raised legitimate concerns regarding the terms of reference and the implementation of this reporting mechanism, and its potential conflict with the national sovereignty of countries, without promoting constructive dialogue.*”²² Edna menjelaskan bahwa akan terjadi konflik potensial dari negara-negara yang menolak karena adanya *independent expert* ini berhubungan bertabrakan dengan kedaulatan negara.

Masalah kedaulatan juga diutarakan oleh negara lain yang tergabung dalam Organization of Islamic Country (OIC) yang diwakili oleh Saudi Arabia “*speaking in a general comment, said that the universality of human rights did not mean the imposition of certain so-called human rights concepts or ideas imposed from the point of view of another party, when those ran counter to some beliefs and specificities. Protecting the universality of human rights should not go beyond the main framework of human rights and be used to interfere in the affairs of*

22 Edna Molewa, "ANC Clarifies UN Vote, and Reaffirms Support for LGBTI Rights and Internet Freedoms," The M&G Online, , accessed September 4, 2017, <https://mg.co.za/article/2016-07-18-00-anc-clarifies-un-vote-and-reaffirms-support-for-lgbti-rights-and-internet-freedoms>

sovereign States. The draft resolution imposed a specific notion that ran counter to religions. Saudi Arabia would not compromise or barter man-made legislation against divine laws. Islam knew the true meaning of human rights. The international community had to refrain from using the Council to interfere in the affairs of other sovereign States. Such resolutions would compromise the functioning of the Council. All were called on to vote yes for the amendments". Saudi Arabia melanjutkan bahwa "...*The international community had to refrain from using the Council to interfere in the affairs of other sovereign States. Such resolutions would compromise the functioning of the Council.*"²³ Negara yang secara umum menyatakan penolakannya terhadap resolusi ini melihat bahwa terdapat usaha untuk mengintervensi urusan negara lain yang seharusnya menjadi urusan negara itu sendiri dan hal tersebut telah melanggar batas yuridiksi suatu negara berdaulat. Hal ini memperteguh pandangan bahwasannya usaha yang sedang dilakukan oleh negara yang mendukung resolusi terkait LGBT justru tidak menghormati negara lain. Baik negara di Afrika dan negara timur tengah memiliki dasar agama dan budaya untuk menentang resolusi tersebut.

NEGOSIASI DAN PERILAKU VOTING AFRIKA SELATAN

Dalam proses ratifikasi suatu persetujuan di negosiasi internasional, level I merupakan proses tawar menawar antar aktor. Lalu level II adalah diskusi terpisah dalam tiap grup konstituen untuk memutuskan apakah suatu negara perlu meratifikasi kebijakan tersebut. Level II yang dimaksud disini termasuk agen birokrasi, grup kepentingan, kelas sosial, atau bahkan opini publik. Level I dan level II saling berhubungan ketika suatu persetujuan pada level II mengalami penolakan maka hal tersebut akan mempengaruhi level II. Kendala yang ditemui dalam proses ratifikasi adalah perjanjian harus diratifikasi oleh kedua pihak. Perjanjian pada level I tidak bisa diamandemen di level II tanpa membuka negosiasi di level I yang akhirnya suatu ratifikasi, melalui *voting*, harus dipilih *up* atau *down*. Modifikasi pada perjanjian tingkat I akan dianggap penolakan kecuali disepakati oleh semua pihak dalam perjanjian.

Voting di Majelis Umum sebagian besar dilihat sebagai simbolik, yang mana PBB merupakan satu-satunya forum di mana sejumlah besar negara bertemu dan memberikan suara secara teratur tentang permasalahan yang menyangkut komunitas internasional.²⁴ Menurut Montessori Model United, *voting* atau suara dibagi menjadi tiga yakni *yes* atau *vote in favor (yes)*, *abstain*, dan *no*. Dimana *vote yes* dan *no* jelas menunjukkan posisi suatu negara terhadap suatu resolusi, maka *abstain* merupakan pilihan diantara *yes* dan *no* yang menunjukkan bahwa tidak mendukung resolusi dan tidak terlalu menentang untuk memilih *no*. Oleh Boockmaan dan Dreher (2011), *no-vote* disebutkan sebagai bentuk tindakan penolakan yang lebih kuat dibanding *abstain*. Boockmaan dan Dreher lebih lanjut menyatakan bahwa sebuah negara yang cenderung memilih untuk *no-vote* dan *abstain* atas kebijakan hak asasi manusia akan mengalami dampak pada kepentingan negara. Negara yang melakukan *no-vote* atau *abstain* bisa dihukum karena dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia melalui sanksi langsung maupun tidak langsung.²⁵ Biasanya sikap *abstain* dapat ditemui pada beberapa resolusi atau amandemen dan biasanya negara-negara

23 Ibid.

24 Simon Hug and Richard Lukács, "Preferences or Blocs? Voting in the United Nations Human Rights Council," *The Review of International Organizations* 9(1) (March 2014):.

yang keberatan dengan amandemen itu akan cenderung memilih untuk melakukan *abstain*. Biasanya sikap *abstain* dapat ditemui pada beberapa resolusi atau amandemen dan biasanya negara-negara yang keberatan dengan amandemen itu akan cenderung memilih untuk melakukan *abstain*. Abstain yang dilakukan suatu negara harus memiliki konteks. Dan tiap negara memiliki konteks yang berbeda. Pada posisi Afrika Selatan, yang sebelumnya pendukung dengan resolusi yang terkait dengan hak LGBT baik di tahun 2011 dan 2014, kemudian memberikan pernyataan bahwa keputusan membentuk independent expert merupakan sesuatu yang arogan merupakan bentuk kemunduran karena memberi ruang untuk pihak yang menolak resolusi tersebut.

Menurut Voeten dalam *Clash in Assembly*, menunjukkan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi kelompok *voting* dan perilaku *voting*, yakni demokrasi, kekayaan peradaban, dan isu spesifik. Afrika Selatan sendiri merupakan negara yang berdiri atas dasar demokrasi sejak tahun 1996. Menurut Voeten, semakin demokratis suatu negara, maka negara tersebut akan semakin membela hak asasi manusia. Demokrasi dijelaskan oleh pemerintah Afrika Selatan yakni keseimbangan antara kekuasaan dan kebenaran. Yakni cirinya adalah negara memiliki semua kekuatan tapi kekuatannya (kekuasaan) harus dibatasi sehingga tidak ada kekerasan dengan menggunakan kekuatan itu (dengan benar); kemudian memiliki konstitusi menjamin independensi mahkamah dan membangun enam institusi independen untuk melindungi masyarakat: Pelindung Publik, Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi untuk Promosi dan Perlindungan Hak Budaya, Minoritas Agama dan Bahasa, Komisi untuk Kesetaraan Gender, Auditor Umum dan Komisi Pemilihan Independen.

Demokrasi bagi Afrika Selatan adalah tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban; demokrasi adalah tentang menyeimbangkan hak mayoritas dengan perlindungan bagi kelompok minoritas. Demokrasi adalah tentang mencapai keseimbangan yang lebih besar di masyarakat sehingga ada kesetaraan yang lebih besar pada suatu periode waktu.²⁶ Keseriusan Afrika Selatan dalam menangani kasus diskriminasi terhadap kelompok LGBT juga ditumpahkan dalam *National Action Plan to Combat Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance* yang berada di bawah Kementrian Keadilan dan Pengembangan Konstitusi, yang merupakan program yang merupakan program Komite Pengarah yang bertugas untuk memastikan bahwa proses penghapusan diskriminasi bersifat konsultatif dan inklusif.²⁷ Dalam *National Action Plan* (NAP) ini, Jeffery menguraikan bahwa Afrika Selatan mempromosikan program anti rasisme dan anti xenophobia; mengadakan edukasi dan program pelatihan untuk meningkatkan kesadaran anti rasisme, kesetaraan dan anti diskriminasi serta memobilisasi dukungan dari berbagai

25 Bernhard Boockmaan, dan Axel Dreher 2011 dalam Simon Hug and Richard Lukács, "Preferences or Blocs? Voting in the United Nations Human Rights Council," *The Review of International Organizations* 9(1) (March 2014)

26 Parliament of the Republic of South Africa, "How Our Democracy Works," , accessed July 21, 2019, <https://www.parliament.gov.za/storage/app/media/EducationPubs/how-our-democracy-works.pdf>.

27 "Deputy Minister John Jeffery: Consultative Workshop on National Action Plan to Combat Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance," Deputy Minister John Jeffery: Consultative Workshop on National Action Plan to Combat Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance | South African Government, May 15, 2015, , accessed July 19, 2019, <https://www.gov.za/speeches/address-deputy-minister-justice-and-constitutional-development-hon-john-jeffery-mp>

ahli; mengumpulkan data untuk diidentifikasi dan dianalisis agar ditemukan solusi efektifnya; membentuk kumpulan data untuk dokumentasi dari semua insiden diskriminasi; dan menginformasikan ke kebijakan pemerintah yang terkait untuk menghindari insiden diskriminasi tersebut.²⁸ Meski kelompok LGBT tidak disebut secara langsung dalam program tersebut, namun isu mengenai diskriminasi terhadap kelompok LGBT masih dimasukkan ke dalam NAP. Nelson Mandela telah membuat pilar mengenai kebijakan luar negeri setelah berakhirnya *apartheid*. Hal tersebut dinyatakan Nelson Mandela pada tahun 1993, diantaranya adalah 1) isu hak asasi manusia adalah hal pokok dari hubungan internasional dan sebuah pengertian yang melampaui politik, merangkul ekonomi, sosial dan lingkungan; 2) permasalahan kemanusiaan hanya dapat dilalui dengan mempromosikan demokrasi di seluruh dunia. 3) pertimbangan keadilan dan rasa hormat untuk hukum internasional menjadi panduan hubungan antar Negara; 4) perdamaian merupakan tujuan yang harus perjuangkan oleh semua negara, dan ketika perdamaian terancam rusak, maka persetujuan secara internasional dan mekanisme non-kekerasan, termasuk rezim pengendalian senjata, harus dilakukan; 4) persoalan dan kepentingan kontinen Afrika harus dicerminkan dalam pilihan kebijakan luar negeri. Peletakan isu hak asasi manusia di atas kontinen memang penting adanya namun di sisi lain, Afrika Selatan

Di sisi kekayaan, Voeten menyatakan bahwa kekayaan memiliki efek yang sangat kuat pada posisi negara di sepanjang dimensi hak asasi manusia, bahkan lebih kuat dari demokrasi.²⁹ Kekayaan yang dimaksud ini adalah bahwa tiap negara akan mencari kekayaan dan keamanan demi stabilitas. Tapi untuk konteks hak asasi manusia, hal ini lebih condong ke arah insentif ekonomi. Jika negara A, yang merupakan negara kecil menerima dana, maka akan ada kecondongan hasil *voting* yang sama dengan pemberi donor. Negara di Afrika seperti Uganda telah diberi peringatan dengan menarik bantuan ekonomi dan pembatalan kerjasama dalam pelatihan militer dengan Uganda yang diberikan oleh Amerika Serikat.³⁰ Sedangkan di sisi lain, Afrika Selatan sendiri yang merupakan negara dengan ekonomi besar di benua Afrika, bersama dengan Nigeria. Selain terdapat keuntungan kerjasama dalam bidang ekonomi bagi keduanya, keduanya berada di dua kubu yang berbeda terkait isu perlindungan hak kelompok LGBT di tahun 2011. Kekuatan ekonomi yang besar juga melibatkan pengaruh yang besar pula. Keadaan ekonomi Nigeria yang membaik ini menjadikan Nigeria memiliki pengaruh yang kuat di tingkat regional Afrika. Dengan kuatnya ekonomi Nigeria, maka Afrika Selatan akan lebih sulit untuk menekan negara-negara lain di kontinen Afrika yang tidak membutuhkan bantuan dari Afrika Selatan. Pendukung gerakan untuk perlindungan hak kelompok LGBT di Afrika sendiri adalah minoritas sementara mayoritas negara di kontinen Afrika memiliki pemerintah anti-LGBT sehingga Afrika Selatan akan menemui kesulitan untuk

28 "Deputy Minister John Jeffery: Consultative Workshop on National Action Plan to Combat Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance," Deputy Minister John Jeffery: Consultative Workshop on National Action Plan to Combat Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance | South African Government, May 15, 2015, , accessed July 19, 2019, <https://www.gov.za/speeches/address-deputy-minister-justice-and-constitutional-development-hon-john-jeffery-mp>

29 Erik Voeten, "Clashes in the Assembly," *International Organization* 54, no. 2 (2000)

30 "U.S. Restricts Police Aid to Africa Over Effects of Anti-LGBT Law," *Amnesty International USA*, July 28, 2014, , accessed July 19, 2019, <https://www.amnestyusa.org/u-s-restricts-police-aid-to-africa-over-effects-of-anti-lgbt-law/>

meminta dukungan dari negara Afrika lain maupun untuk membangun aliansi ekonomi sehingga posisi Afrika Selatan cukup tertekan.

Faktor ketiga yaitu peradaban, yang mana menyatakan bahwa negara bekas kolonial akan menunjukkan ketidaksenangan mereka atas negara yang dulu pernah menjajah mereka. Dengan adanya sejarah apartheid yang pernah dialami oleh Afrika Selatan lebih dari setengah abad, serta penjajahan yang dialami oleh sebagian besar negara di Afrika, hal ini membuat Afrika Selatan berjuang atas haknya sebagai orang-orang yang pernah terjajah. Sedangkan dari blok Afrika sendiri, perlawanan terhadap homoseksualitas ini digunakan untuk melawan negara Barat. Afrika Selatan sendiri memiliki permasalahan peradaban. Namun di sisi lain, selama menuju kemerdekaan dan pembebasan kulit hitam di Afrika Selatan ditemui bahwa mereka pun mendapat bantuan dari negara lain seperti Inggris.

Sedangkan di area isu spesifik, Afrika Selatan merupakan negara yang telah dikenal oleh internasional sebagai pelopor perlindungan hak kelompok LGBT. Isu mengenai perlindungan kelompok LGBT bukan merupakan isu yang baru lagi karena perjuangan kelompok LGBT turut menyumbangkan kemerdekaan bagi Afrika Selatan. Nelson Mandela dan ANC yang merangkul kelompok dan organisasi internasional membuat homoseksualitas tidak terlepas dari cerita sejarah kemenangan dan penghapusan politik apartheid di Afrika Selatan, meski cukup banyak dari tokoh waktu itu tidak menerima kehadiran mereka. Namun sayangnya isu ini kemudian dikaitkan dengan hubungan antara negara barat, isu penjajahan, serta masuknya LGBT melalui penjajahan. Terlebih isu LGBT bukan merupakan isu utama bagi Afrika, melainkan rasisme. Presiden Afrika Selatan, Jacob Zuma, pada tahun 2016 pada pidatonya di depan Majelis Umum PBB menekankan pada isu rasial dan tidak menyinggung sama sekali terkait permasalahan hak LGBT yang terjadi pada tahun yang sama serta sebagai negara pelopor. Sedangkan di kesempatan lain perwakilan Botswana untuk PBB, Charles Ntwaagae, menyatakan permintaannya untuk menunda legalitas mandat ini kepada Majelis Umum PBB (UNGA). Ntwaagae menjelaskan bahwa negara-negara di kontinen Afrika khawatir bahwa Dewan Hak Asasi Manusia (UNHRC) akan menyelidiki permasalahan nasional dengan dalih perlindungan hak asasi yang berfokus pada sekelompok orang dengan alasan perilaku seksual mereka. UNHRC dianggap mengabaikan kenyataan bahwa intoleransi dan diskriminasi masih terjadi di berbagai belahan dunia, baik itu berdasarkan warna kulit, ras, jenis kelamin atau agama, hanya untuk berfokus pada masalah hak kelompok LGBT di Afrika. Ntwaagae melanjutkan bahwa isu ini juga seperti sebuah upaya yang dilakukan untuk menggeser isu rasisme oleh negara barat (*western*) dan dialihkan ke isu orientasi seksual.

Kesimpulan

Dari tulisan di atas, penulis menemui alasan mengapa Afrika Selatan memutuskan untuk abstain. Dalam Simon Hugs dan Richard Lukacs (2014) melalui berbagai sumber menemukan bahwa voting yang terjadi di tingkat negosiasi internasional, yang dihadiri oleh banyak negara, biasanya memiliki suatu pola pengelompokan yang disebut dengan blok. Blok ini bisa berdasarkan geografis, solidaritas atau tujuan tertentu, keakraban regional, praktik kaukus, atau campuran dari beberapa hal seperti sekelompok dengan kesatuan geografis, sejarah, dan ideologi. Teori ini memungkinkan bahwa pengambilan suatu

keputusan yang dilakukan oleh negara akan memiliki kecenderungan pada dimensi geografis, yang mana dalam hal ini Afrika Selatan berkelompok dan negara Afrika lainnya. Lalu secara sejarah, Afrika Selatan memiliki kesamaan sejarah kolonialisme oleh negara barat serta isu rasisme yang terhubung dengan negara-negara geografisnya. Solidaritas yang dibangun dengan negara-negara Afrika lainnya juga dituangkan oleh Afrika Selatan melalui pilar-pilar kebijakan Nelson Mandela dan masih dijaga di bawah pemerintahan Jacob Zuma. Solidaritas dengan kesamaan sejarah dan geografi ini dijadikan Jacob Zuma sebagai landasan kebijakan luar negerinya pada piplar kebijakan Afrika Selatan 2009-2014 yang menitikberatkan pada kontinen Afrika sebagai prioritas, kemudian kerjasama dengan negara Selatan. Baru kemudian Afrika Selatan bekerja sama dengan negara utara, kerjasama bidang ekonomi dan politik, lalu partisipasi dalam pemerintahan global. Terlebih memiliki pandangan bahwasannya prinsip dan norma non-intervensi juga kuat sehingga adanya kecenderungan untuk memilih menolak resolusi *protection against violence based on sexual orientation and gender identity* tentang pendirian *independent expert*. Maka dari itu, norma domestik yang dianut tidak sejalan dengan norma non-intervensi yang diinternalisasi dari Uni Afrika. Sedangkan di sisi lain, dalam konteks *voting* yang diadakan, Afrika Selatan cenderung mendekat dan sepemikiran dengan negara dari blok Afrika serta memprioritaskan negara Afrika atas dasar kesamaan norma tersebut.

Referensi:

Buku:

- Breuning, Marijke. *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. New York: Palgrave MacMillan, 2007.
- Gomes Da Costa Santos, Gustavo. *Decriminalising Homosexuality in Africa: Lessons from the South African Experience*. In: *Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity in The Commonwealth: Struggles for Decriminalisation and Change*. Institute of Commonwealth Studies. University of London, 2013.
- Human Rights Watch. *Together, Apart 1– Organizing around Sexual Orientation and Gender Identity Worldwide*. New York: Human Rights Watch., 2009.
- Mas'oed, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional (disiplin Dan Metodologi)*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1994.
- Neack, Laura. *The New Foreign Policy*. 2nd ed. USA: Rowman & Littlefield Publishers, 2008.
- Plantey, Alain. *International Negotiation in the Twenty-First Century*,. 1st ed. London: Routledge-Cavendish, 2013. Accessed December 12, 2018. <https://doi.org/10.4324/9780203945414>.
- Ru, Henriët D. "A Historical Perspective on the Recognition of Same-sex Unions in South Africa." *Fundamina*19(2) (2013).
- William, Nicholas. *Social Research Method*. London: SAGE, 2006.

Halaman internet:

- African National Congress. "South Africa's Future Foreign Policy: Article by Nelson Mandela in Foreign Affairs, Vol. 72, No.5." 1993. Accessed August

- 22, 2017. <http://www.anc.org.za/content/article-nelson-mandela-foreign-affairs-vol-72-no5>.
- "Appointing an Independent Expert on Sexual Orientation and Gender Identity: An Analysis of Process, Results and Implications." ARC International. Accessed December 06, 2018. <http://arc-international.net/global-advocacy/human-rights-council/32nd-session-of-the-human-rights-council/appointing-an-independent-expert-on-sexual-orientation-and-gender-identity-an-analysis-of-process-results-and-implications/>.
- ARC International. "Sexual Orientation, Gender Identity and Expression and Intersex Related Developments at the 27th Session of the UN Human Rights Council 8 – 26 September 2014." *ARC International*, 2014. Accessed October 22, 2016. <http://arc-international.net/wp-content/uploads/2014/09/ARC-report-HRC27.pdf>.
- ARC International. "South Africa: Abstention as Regression." *ARC-International*, 2016. Accessed October 9, 2016. <http://arc-international.net/global-advocacy/human-rights-council/32nd-session-of-the-human-rights-council/appointing-an-independent-expert-on-sexual-orientation-and-gender-identity-an-analysis-of-process-results-and-implications/iv-understanding-the-political-why-did-states-vote-the-way-they-did/south-africa-abstention-as-regression/>.
- Case CCT 11/98, <Http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/1998/15.pdf> (CONSTITUTIONAL COURT OF SOUTH AFRICA 1998).
- Ditsie, Palesa Beverley. "Lesbian Statement at WCW Plenary." *International Gay and Lesbian Human Rights Commission United Nations Fourth World Conference on Women*, September 13, 1995. Accessed September 30, 2017. <http://www.hartford-hwp.com/archives/28/014.html>.
- Feder, J. Lester. September 19, 2014. Accessed March 23, 2018. <https://www.buzzfeednews.com/article/lesterfeder/south-africa-which-once-led-on-promoting-lgbt-rights-abroad>.
- Human Rights Watch. *Together, Apart 1– Organizing around Sexual Orientation and Gender Identity Worldwide*. New York: Human Rights Watch., 2009.
- Hancock, Laura, and Lauren Suk. "Dozens Arrested as South Korean Military Conducts 'gay Witch-hunt'." *CNN*, June 12, 2017. Accessed on August 12, 2017. <https://edition.cnn.com/2017/06/11/asia/south-korea-lgbt-military/index.html>.
- Human Rights Watch. "UN: General Assembly Statement Affirms Right ForAll." *Human Rights Watch*, June 18, 2008. Accessed August 23, 2017. <https://www.hrw.org/news/2008/12/18/un-general-assembly-statement-affirms-rights-all>.
- "Hypocrisies and Contradictions: Western Aid and LGBT Rights in Africa." *Polity.org.za*. Accessed July 19, 2019. <https://www.polity.org.za/article/hypocrisies-and-contradictions-western-aid-and-lgbt-rights-in-africa-2014-04-15>.
- Iranti. "SOGI Conference 2013, Sexual Orientation and Gender Identity." *Iranti*. Accessed September 2, 2017. http://www.iranti-org.co.za/content/Events/2013/2013-Conference-SOGI/2013_SOGI_conference.html.
- Human Rights Watch. "UN Makes History on Sexual Orientation, Gender Identity." *Human Rights Watch*, June 30, 2016. Accessed October 8, 2016.

- <https://www.hrw.org/news/2016/06/30/un-makes-history-sexual-orientation-gender-identity>.
- International Lesbian Gay Bisexual Trans and Intersex Association. "UN Durban Review 2009, States Must Do More to Explicitly Protect LGBTI People." *International Lesbian Gay Bisexual Trans and Intersex Association*. Accessed September 2, 2017. <http://ilga.org/un-durban-review-2009/>.
- Judge, Melanie. "SA's Abstinence on UN Sexual and Gender Rights Vote Is Reckless." *Mail & Guardian*, July 6, 2016. Accessed October 9, 2016. <https://mg.co.za/article/2016-07-06-00-sa-reckless-on-un-gender-and-sexual-rights-vote>.
- Kennedy, Bret. "Homosexual in the Periphery – Gay and Lesbian in Developing Africa." *Nebraska Anthropologist*, 2006.
- Loewenstein, Antony. "US Evangelicals in Africa Put Faith into Action but Some Accused of Intolerance." *The Guardian*. March 18, 2015. Accessed July 18, 2019. <https://www.theguardian.com/world/2015/mar/18/us-evangelicals-africa-charity-missionaries-homosexuality>.
- Mamba Online. "Watch Out Africa Sell Out LGBTI People at the UN." *Mamba Online*, July 4, 2016. Accessed October 22, 2016. <http://www.mambaonline.com/2016/07/04/watch-south-africa-sell-lgbt-people-un/>.
- Marissa, Cramer Richard, and Goldman Rodha. "South Africa Betrays Principles on Gay Rights." *United Nations Watch*, March 11, 2009. Accessed August 29, 2017. <https://www.unwatch.org/south-africa-betrays-principles-on-gay-rights/>.
- Molewa, Edna. "ANC Clarifies UN Vote, and Reaffirms Support for LGBTI Rights and Internet Freedoms." *The M&G Online*. Accessed September 4, 2017. <https://mg.co.za/article/2016-07-18-00-anc-clarifies-un-vote-and-reaffirms-support-for-lgbti-rights-and-internet-freedoms>.
- Nwaubani, Adaobi Tricia. "LGBT Acceptance Slowly Grows in Nigeria, despite Anti-gay Laws." *Reuters*. May 16, 2017. Accessed June 19, 2019. <https://www.reuters.com/article/us-nigeria-lgbt-survey/lgbt-acceptance-slowly-grows-in-nigeria-despite-anti-gay-laws-idUSKCN18C2T8>.
- Nwaubani, Adaobi Tricia. "Why Are Nigerians Terrified of Gay Marriage in America?" *CNN*. July 06, 2015. Accessed July 19, 2019. <https://edition.cnn.com/2015/07/06/opinions/nigeria-america-gay-marriage/index.html?no-st=1564571736>.
- Republic of South Africa. "Civil Union Act 2006." 2006. Accessed October 8, 2016. https://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/a17-06_1.pdf.
- Reid, Graeme. "South Africa's Worrying Prevarication LGBT Right." *Human Rights Watch*, September 22, 2014. Accessed September 2, 2017. <https://www.hrw.org/news/2014/09/22/south-africas-worrying-prevarication-lgbt-rights>.
- South African Human Rights Commission. "Ekurhuleni Declaration: On Practical Solutions On Ending Violence And Discrimination Against Persons Based On Sexual Orientation And Gender Identity And Expression." 2016. Accessed August 13, 2017. http://www.chr.up.ac.za/images/files/news/news_2016/EKURHULENI_DECLARATION_FINAL.pdf.
- Staff, Associated Press and. "African Nations Attempt to Suspend UN's LGBT Rights Monitor." *The Guardian*. November 07, 2016. Accessed July 19,

2019. <https://www.theguardian.com/global-development/2016/nov/07/african-nations-attempt-suspend-un-united-nations-lgbt-rights-monitor-vitit-muntarhorn>.
- Tatchell, Peter. "South Africa: How the ANC Was Won for LGBT Rights." http://www.petertatchell.net/lgbt_rights/south-africa-how-the-anc-was-won-for-lgbt-rights-2/.
- Taylor, Darren. "It's Lesbians vs Police in South African Township." *VOA News*, February 2, 2011. Accessed June 6, 2017. <https://www.voanews.com/a/its-lesbians-vs-police-in-south-african-township--115178849/157377.html>.
- The Guardian. "Issues First Resolution Condemning Discrimination against Gay People." *The Guardian*, June 17, 2011. Accessed September 2, 2017. <https://www.theguardian.com/world/2011/jun/17/un-resolution-discrimination-gay-people>.
- United Nations. "United Nations: Partner in the Struggle Against Apartheid." *United Nations*. Accessed August 27, 2017. <http://www.un.org/en/events/mandeladay/apartheid.shtml>.
- Waan, Shaun D. "SA Responds to Anti-gay Law by "taking Note"." *Mail & Guardian*, February 25, 2014. Accessed October 21, 2016. <https://mg.co.za/article/2014-02-25-sa-responds-to-anti-gay-laws-by-taking-note>.
- United Nations Non Governmental Liaison Service. "Historic Overview on the World Conference on Women." 2009. Accessed August 23, 2017. www.un-ngls.org/index.php/un-ngls_news_archives/2009/2524-historic-overview-on-the-world-conferences-on-women.
- "U.S. Restricts Police Aid to Africa Over Effects of Anti-LGBT Law." Amnesty International USA. July 28, 2014. Accessed July 19, 2019. <https://www.amnestyusa.org/u-s-restricts-police-aid-to-africa-over-effects-of-anti-lgbt-law>

Jurnal:

- Adair, Wendi L., and Mara Olekalns. "The Complexity of Negotiating: From the Individual to the Context, and What Lies between." *Handbook of Research in Negotiation*, 2013, 3-24. https://www.researchgate.net/publication/272169655_The_complexity_of_negotiating_From_the_individual_to_the_context_and_what_lies_between.
- Amitav Acharya. "Norm Subsidiarity and Regional Orders: Sovereignty, Regionalism, and Rule-Making in the Third World." *International Studies Quarterly* 55, no. 1 (March 2011): 95-123. Accessed July 20, 2019. [http://www.amitavacharya.com/sites/default/files/Norm Subsidiarity and Regional Orders.pdf](http://www.amitavacharya.com/sites/default/files/Norm%20Subsidiarity%20and%20Regional%20Orders.pdf).
- Aneme, Girmachew Alemu. "Introduction to the Norms and Institutions of the African Union." November/December 2010. Accessed July 20, 2019. https://www.nyulawglobal.org/globalex/African_Union.html#intervention
- Angert, Sara. *Branding LGBT in South Africa*, 2014. Accessed October 2, 2016. [http://www.philau.edu/collegestudies/Documents/Sara Angert.pdf](http://www.philau.edu/collegestudies/Documents/Sara%20Angert.pdf).
- Bilchitz, David. "Constitutional Change and Participation of LGBTI Groups: A Case Study of South Africa." *Institute for Democracy and Electoral Assistance*. Accessed 2015.

- <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/constitutional-change-and-participation-of-lgbti-groups-south-africa.pdf>.
- Boekle, Henning, Volker Rittberger, and Wolfgang Wagner. "Norms and Foreign Policy: Constructivist Foreign Policy Theory." 1999. Accessed August 1, 2019.
https://www.academia.edu/17648915/Norms_and_Foreign_Policy_Constructivist_Foreign_Policy_Analysis.
- Brown, Roderick. "Corrective Rape in South Africa: A Continuing Plight Despite an International Human Rights Response." *Annual Survey of International & Comparative Law* 18, no. 1 (2012). Accessed October 2, 2016. <http://digitalcommons.law.ggu.edu/annlsurvey/vol18/iss1/5>.
- Brown, Thomas. "South Africa'S Gay Revolution: The Development of Gay And Lesbian Rights in South Africa'S Constitution and the Lingering Societal Stigma towards the Country'S Homosexuals." *Elon Law Review*, 2nd ser., 6 (2014).
- Carlsnaes, Walter. "Foreign Policy." *Handbook of International Relations*, 2002, 331-49.
- Croucher, Sheila. "South Africa's Democratization and the Politics of Gay Liberation." *Journal of Southern African Studies* 28 NO. 2 (2002). Accessed October 4, 2016. <https://doi.org/10.1080/03057070220140720>.
- Christian, Downie. "International Negotiations." *Regulatory Theory: Foundations and Applications*, 2017. doi:10.22459/RT.02.2017.19.
- Cohen, Raymond. "Meaning, Interpretation and International Negotiation." *Global Society* 14(3) (2000): 317-35. doi:10.1080/13600820050085732.
- Dugis, Vinsensio. "Analysing Foreign Policy." *Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik*, 2nd ser., 20 (2007): 41-52.
- Eduard, Jordaan. "South Africa and Sexual Orientation Rights at the United Nations: Batting for Both Sides." *Politikon*, 2017, 1-26. Accessed August 21, 2017. http://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=3336&context=soss_research.
- Eidenfalk, Joakim. "Towards a New Model of Foreign Policy Change." Australasian Political Studies Association Paperwork, 2006.
- Ettelbrick, Paula L, and Alia Trabucco Zerán. "The Impact of the Yogyakarta Principles on International Human Rights Law Development, A Study of November 2007 - June 2010." *The Principal in Action*, 2010. Accessed October 21, 2016. http://ypinaction.org/wp-content/uploads/2016/10/Yogyakarta_Principles_Impact_Tracking_Report.pdf.
- Farmer, Leila J. "Sovereignty and the African Union." *The Journal of Pan African Studies* 4 No. 10 (January 10, 2012): 93-105. Accessed July 29, 2019. <http://www.jpanafrican.org/docs/vol4no10/4.10Sovereignty.pdf>.
- Flaherty, and Fisher. "Sexual Orientation, Gender Identity and International Human Rights Law: Contextualising TheYogyakarta Principles." *Human Rights Law Review*., 2008, 1-42.
- Francis, Dennis, and Reygan, Finn. "'Let's See If It Won't Go Away by Itself.' LGBT Microaggressions among Teachers in South Africa." *Education as Change* 20(3) (2016): 180-201. Accessed February 8, 2019. doi:10.17159/1947-9417/2016/1124.

- Finnemore, Martha & A. Sikkink, Kathryn. "International Norm Dynamics and Political Change." *International Organization*, 2005. 52. 10.1162/002081898550789.
- Gawanas, Bience. "The African Union: Concepts and Implementation Mechanisms Relating to Human Rights." *Human Rights in Africa, Legal Perspectives on Their Protection and Promotion*, 2009. Accessed July 11, 2019. Human Rights in Africa Legal Perspectives on their Protection and Promotion.
- General Assembly of United Nations. *Question of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. 2001. <http://www.un.org/documents/ga/docs/56/a56156.pdf>.
- Hancocks, Paula. "Dozens Arrested as South Korean Military Conducts 'gay Witch-hunt'." CNN. June 12, 2017. Accessed September 06, 2017. <https://edition.cnn.com/2017/06/11/asia/south-korea-lgbt-military/index.html>.
- Hug, Simon, and Richard Lukács. "Preferences or Blocs? Voting in the United Nations Human Rights Council." *The Review of International Organizations* 9(1) (March 2014): 83-106.
- Lande, John. "Taming The Jungle Of Negotiation Theories." *University of Missouri School of Law Legal Studies Research Paper No. 2017-29*, 2017. Accessed May 19, 2018. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3089855.
- McGoldrick, Dominic. "The Development and Status of Sexual Orientation Discrimination under International Human Rights Law." *Human Rights Law Review* 16, no. 4 (December 1, 2016): 613-68. Accessed November 7, 2017. doi:<https://doi.org/10.1093/hrlr/ngw030>.
- Mnookin, Robert H., and Lewis Kornhauser. "Bargaining in the Shadow of the Law: The Case of Divorce." *The Yale Law Journal* 88 No. 5 (1979): 950-97. Accessed June 20, 2019. doi:10.2307/795824.
- Muller, Alex. "Public Health Care for South African Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender People: Health Rights Violations and Accountability Mechanisms." *The South African Medical Journal* 104, no. 8 (2014). Accessed July 5, 2018. https://www.researchgate.net/publication/267237378_Public_Health_Care_for_South_African_Lesbian_Gay_Bisexual_and_Transgender_People_Health_Rights_Violations_and_Accountability_Mechanisms/link/5448be330cf22b3c14e3226e/download.
- Nichols, Sharon L. "Gay, Lesbian, and Bisexual Youth: Understanding Diversity and Promoting Tolerance in Schools." *The Elementary School Journal* 99 No. 5 (1999): 505-19. Accessed January 27, 2019. <https://www.jstor.org/stable/1002302>.
- Office of the High Commissioner for Human Rights (2000) Commission on Human Rights resolution 2000/31 Extrajudicial, summary or arbitrary executions [WWW] Office of the High Commissioner for Human Rights. Tersedia dalam: http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2000-31.doc [diakses pada 08/10/2016].
- Putnam, Robert D. "Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games." *International Organization*, 42, 3, 1988, 437-52.
- Raygan, Finn, and Ashley Lynette. "Heteronormativity, Homophobia and 'culture' Arguments in KwaZulu-Natal, South Africa." *Sexualities* 17(5/6) (2014): 707-23. doi:DOI: 10.1177/1363460714531267.

- Rosenbloom, Adam. "LGBT Discrimination in Africa." *Kaleidoscope Journal* 5, no. 2 (2014). https://www.bckaleidoscope.org/uploads/9/2/6/6/92665638/5_2_s14_1_gbt_discrimination_south_africa.pdf.
- Saiz, Ignacio. "BRACKETING SEXUALITY: Human Rights and Sexual Orientation—A Decade of Development and Denial at the UN." *Sexuality, Human Rights and Health* 7 No. 2 (2004): 49-80. Accessed October 19, 2016. <http://www.jstor.org/stable/4065348>.
- United Nations High Commissioner of Refugees (2012) *GUIDELINES ON INTERNATIONAL PROTECTION NO. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*.
- Vincent, Louise, and Simon Howell. "'Unnatural', 'Un-African' and 'Ungodly': Homophobic Discourse in Democratic South Africa." *Sexualities* 17(4) (2014): 472-83. doi:10.1177/1363460714524766.
- Voeten, Erik. "Clashes in the Assembly." *International Organization* 54, no. 2 (2000): 185-215.
- Westcott, Nicholas. "Foreign Policy In Post-Apartheid South Africa: Security, Diplomacy And Trade." *Foreign Policy in Post-Apartheid South Africa: Security, Diplomacy and Trade*, 2017. Accessed March 14, 2018. <http://www.justice.gov.za/legislation/constitution/SACConstitution-web-eng-02.pdf>.

Laporan:

- Global Legal Research Center Directorate. *Laws on Homosexuality in African Nation*. Working paper. The Law Library of Congress. <https://www.loc.gov/law/help/criminal-laws-on-homosexuality/homosexuality-laws-in-african-nations.pdf>, 2014.
- International Lesbian Gay Bisexual Trans and Intersex Association. *Sexual Orientation Laws in the World – Criminalisation*. Report. ILGA. http://ilga.org/downloads/2017/ILGA_WorldMap_ENGLISH_Criminalisation_2017.pdf, 2017.
- United Nations High Commissionair of Refugee. "GUIDELINES ON INTERNATIONAL PROTECTION NO. 9:." October 23, 2012. Accessed September 26, 2017. <https://www.unhcr.org/509136ca9.pdf>.
- Office of the High Commission for Human Rights. CESCR General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12). Accessed July 5, 2018. <https://www.refworld.org/pdfid/4538838do.pdf>.
- OUT LGBT-Well Being. *Hate Crimes against Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender in South Africa 2016*. Report. <http://www.out.org.za/index.php/library/reports?download=30:hate-crimes-against-lgbt-people-in-south-africa-2016>, 2016.
- The Other Foundation. *Progressive Prudes, A Survey of Attitudes towards Homosexuality & Gender Non-conformity in South Africa*. Report. The Other Foundation. 2016.
- Toonen v. Australia Communication No. 488/1992 U.N. Doc CCPR/C/50/D/448/1992, <http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Toonen> v. Australia.pdf (United Nations Human Rights Committee 1994).

United Nations Human Rights Council. *Resolution human rights, sexual orientation, and gender identity 2011*. United Nations Human Rights Council. Tersedia dalam: [https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/148/76/PDF/G1114876.pdf?](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/148/76/PDF/G1114876.pdf?OpenElement) OpenElement, 2011.

Sumber lain:

Department Basic Education Republic of South Africa. "SOUTH AFRICAN SCHOOLS ACT NO. 84 OF 1996." 1996. <https://www.education.gov.za/LinkClick.aspx?fileticket=aIolZ6UsZ5U=&tabid=185&mid=1828>.

Department of Justice and Constitutional Development. "Chapter 2: Bill of Rights." Accessed May 15, 2017. <http://www.justice.gov.za/legislation/constitution/SACConstitution-web-eng-02.pdf>.

Department of Justice and Constitutional Development. "National Intervention Strategy for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex (LGBTI) Sector." 2013. Accessed December 30, 2017. <http://www.justice.gov.za/vg/lgbti/NIS-LGBTIProgramme.pdf>.

"Deputy Minister John Jeffery: CSO Alliance Building Workshop on LGBTI Rights." Deputy Minister John Jeffery: CSO Alliance Building Workshop on LGBTI Rights | South African Government. February 25, 2014. Accessed July 27, 2019. <https://www.gov.za/address-deputy-minister-justice-and-constitutional-developmentthe-hon-jh-jeffery-mp-cso-alliance>.

"Deputy Minister John Jeffery: Consultative Workshop on National Action Plan to Combat Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance." Deputy Minister John Jeffery: Consultative Workshop on National Action Plan to Combat Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance | South African Government. May 15, 2015. Accessed July 19, 2019. <https://www.gov.za/speeches/address-deputy-minister-justice-and-constitutional-development-hon-john-jeffery-mp>.

Ditsie, Palesa Beverley. "Lesbian Statement at WCW Plenary." Speech, International Gay and Lesbian Human Rights Commission United Nations Fourth World Conference on Women, China, Beijing, September 13, 1995.

Montessori Model United Nations. "MMUN Vocabulary." *MMUN*. Accessed June 7, 2018. <https://montessori-mun.org/mmun-vocabulary/>.

"National Action Plan to Combat Racism, Racial ..." Accessed May 16, 2019. https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201903/national-action-plan.pdf.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. *MINORITY RIGHTS UNDER THE AFRICAN CHARTER ON HUMAN AND PEOPLES' RIGHTS*.

Parliament of the Republic of South Africa. "How Our Democracy Works." Accessed July 21, 2019. <https://www.parliament.gov.za/storage/app/media/EducationPubs/how-our-democracy-works.pdf>.

"President Jacob Zuma: Address during UN Plenary Session High Level Summit "Accessed April 20, 2019. <https://www.gov.za/speeches/statement-president-jacob-zuma-un-plenary-session-19-sep-2016-0000>.

- South Africa Department of Basic Education. "South African Schools Act No. 84 of 1996." *Department of Basic Education*, 2000. Accessed February 10, 2019. <https://www.education.gov.za/LinkClick.aspx?fileticket=aIolZ6UsZ5U=&tabid=185&mid=1828>.
- Stonewall. "Glossary of Terms." <https://www.stonewall.org.uk/help-advice/glossary-terms#h>.
- The Presidency Republic of South Africa. "Together Doing More and Better Medium Term Strategic Framework: A Framework to Guide Government's Programme in the Electoral Mandate Period." *UNPAN*. Accessed June 21, 2018. <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cpsi/unpan035516.pdf>.
- United Nations Free and Equal. *Born Free and Equal, Sexual Orientation and Gender Identity in International Human Rights Law*. United Nations Free and Equal, 2012.
- United Nations Human Rights Council. Protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity 2016. United Nations Human Rights Council. Tersedia dalam: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/RES/32/2, 2016.
- United Nations Human Rights Council. *Resolution human rights, sexual orientation, and gender identity 2011*. United Nations Human Rights Council. Tersedia dalam: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/148/76/PDF/G1114876.pdf?OpenElement>, 2011.
- United Nations World Conference Against Racism Declaration. *World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance. Durban, South Africa, 31 Agustus-8 September 2001*. United Nations. Tersedia dalam: <http://www.un.org/WCAR/durban.pdf>, 200

